

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini dunia internasional memiliki dua negara yang mendominasi yakni Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara ini seringkali berbeda pendapat dalam menanggapi permasalahan dunia. Sebelum hubungan keduanya seperti sekarang ini, AS dan Rusia memiliki sejarah hubungan yang panjang sejak perang Dunia I. Perang Dunia I menandai konflik internasional yang berpusat di daerah Balkan pada awal abad ke 20. Perang Dunia I atau disebut sebagai Great War ini yang terpusat di Eropa berlangsung 28 Juli 1914 - 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar negara di dunia yang kemudian terbagi menjadi dua aliansi yakni blok Entente (Sekutu) terdiri dari Inggris, Perancis, Serbia dan Uni Soviet atau sekarang ini disebut sebagai Rusia, melawan blok Sentral dalam terdiri dari Jerman dan Austria-Hungaria. Belakangan Amerika Serikat bergabung pada blok sekutu setelah Jepang (salah satu kekuatan blok Poros) mengebom Pearl Harbor di Hawaii, yang menyebabkan Amerika Serikat keluar dari kebijakan isolasionisme pada waktu itu yang bertujuan untuk tidak terlibat dalam konflik apapun, setelah keluar dari kebijakan tersebut AS mulai terlibat langsung dalam peperangan hingga sekarang.

Pasukan baru dari American Expeditionary Force (AEF) di bawah kepemimpinan Jenderal John J. Pershing dan ditambah dengan blokade yang

semakin ketat terhadap pelabuhan Jerman, pada akhirnya membantu mengubah kondisi perang sehingga menguntungkan blok Entente (Kristallnacht, 2013). Mulai dari sinilah hubungan baik antara AS dan Rusia mulai terjalin, hingga pada akhir Perang Dunia II hubungan AS dan Rusia mulai terjadi konflik. Terjadi pada saat Jerman mulai kalah dan dikuasai oleh negara-negara sekutu. Jerman dibagi menjadi 2 bagian yaitu Jerman Barat yang dikuasai oleh Amerika dan Jerman Timur di kuasai Uni Soviet. PascaPerang, persaingan antara kedua negara tersebut mulai terlihat. Amerika mulai membangun pertahanan terhadap komunisme dengan membentuk sejumlah aliansi dengan berbagai negara, terutama dengan negara di Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Meskipun kedua negara adikuasa itu tak pernah bertempur secara langsung, namun konflik di antara keduanya secara tak langsung telah menyebabkan berbagai perang lokal seperti Perang Korea, Perang Vietnam, dan juga krisis di Timur Tengah.

Perang di Timur Tengah salah satu contohnya adalah perang di Afghanistan. Perang ini merupakan sebuah bentuk persaingan ideologi dari kedua negara ini. Pemerintah berideologikomunis yang dipimpin oleh Noor Muhammad Tariki pada waktu itu berhasil menurunkan Daoud Khan melalui kudeta. Tetapi, hal tersebut mendapatkan perlawanan dari kelompok Hafizullah Amin. Maka dari itu Uni Soviet pada Desember 1979 melakukan invasi militer ke Afghanistan untuk mempertahankan komunisme di negara tersebut, serta untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat dan pengaruh liberalismenya di

Asia Barat. Invasi ini mendapatkan perlawanan dari kelompok Mujahidin yang akhirnya mampu mengalahkan Uni Soviet dan pada tahun 1989 pasukan Uni Soviet di tarik mundur dari Afghanistan (Is, 2016).

Sampai pada akhir tahun 1990an Uni Soviet runtuh yang mengakibatkan beberapa daerah bekas Uni Soviet memisahkan diri dan mendirikan negara terpisah satu sama lain. Namun, negara terbesar Rusia seakan menggantikan Uni Soviet pada masa modern. Rusia memiliki kekuatan yang cukup besar dalam bidang militer, ekonomi dan politik yang tidak kalah dengan Amerika Serikat. Belakangan, kedua negara ini terlihat berselisih pendapat mengenai konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah salah satunya di Suriah. Konflik Suriah bermula ketika pada tanggal 26 Januari 2011 terjadi aksi bunuh diri oleh warga Suriah dengan cara melakukan bakar diri. Aksi ini merupakan bentuk protes oleh rakyat yang menuntut penghentian Rezim AlAssad serta tuntutan pemberhentian undang-undang darurat yang telah diterapkan sejak 1963, karena undang-undang tersebut dianggap tidak memenuhi kepentingan rakyat Suriah yang menginginkan sistem pemerintahan yang demokrasi sepenuhnya.

Konflik Suriah ini sendiri pada hakikatnya merupakan konflik kepentingan dan ideologis yang melibatkan banyak aktor baik *state* maupun *non-state*. Konflik ini terjadi karena pemimpin Suriah yakni Bashar Al Assad kehilangan legitimasi politiknya akibat menggunakan kekuasaannya secara otoriter terhadap rakyatnya. Implikasi dari kekuasaan yang otoriter tersebut yakni rakyat menjadi menderita dan pada akhirnya membentuk pergerakan yang

menuntut agar Bashar Al Assad mengundurkan diri sebagai pemimpin. Kondisi semakin meluas dan bersamaan dengan peristiwa *Arab Spring* yang terjadi dikawasan Timur Tengah lainnya, rakyat Suriah semakin yakin untuk melakukan revolusi untuk menurunkan kekuasaan Assad. Terdapat dua aktor dalam konflik ini, antara lain aktor internal dan aktor eksternal. Pemetaan aktor internal berasal dari rezim Bashar Al Assad, koalisi nasional Suriah, dan kelompok militan Suriah. Sedangkan Aktor eksternal berasal dari kekuatan luar negeri yakni dari Rusia, China, dan Amerika Serikat. Banyaknya aktor yang terlibat di dalamnya memberikan gambaran bagaimana terdapat kepentingan-kepentingan di konflik ini (Darwis, Konflik Suriah dalam Tinjauan Keamanan Internasional (Suatu Kajian “Wacana” Posmodernisme), 2013).

Rusia dan Suriah di ketahui memiliki hubungan baik dalam bidang politik sejak tahun 1970an. Hubungan baik antara Rusia dan Suriah tentu saja mendapatkan kritik dari dari pihak lawan. Amerika Serikat menduga bahwa Suriah dan Rusia bekerjasama dalam penggunaan senjata kimia dikonflik ini. Melalui juru bicara kementerian luar negeri Amerika Jen Psak, mengungkapkan bahwa Amerika sedang menyelidiki dugaan pemerintah Suriah yang bertanggung jawab atas indikasi penggunaan senjata kimia dalam konflik yang terjadi di kota Kfar Zeita, kota ini adalah tempat yang dikuasai oleh pemberontak. Amerika juga menyatakan bahwa Rusia telah membiarkan fakta-fakta bahwa Suriah menggunakan senjata Kimia dalam pertempuran. Mendengar hal ini, Rusia menyatakan bahwa Amerika perlu membuktikan kembali tentang

penggunaan senjata kimia oleh Suriah. Rusia melalui Presiden Putin menilai bahwa hal ini merupakan provokasi dari negara-negara tertentu (Nuroyo, Mutiadji, & Firmansyah, 2013). Isu mengenai penggunaan senjata kimia mulai diperkuat dengan adanya kesimpulan dari PBB yang mengatakan bahwa Suriah terbukti menggunakan senjata kimia dalam konflik ini, tentu saja hal tersebut semakin memperkuat posisi Amerika untuk melakukan intervensi terhadap Suriah.

Dalam konflik ini, Amerika Serikat selaku pendukung oposisi tentu saja memiliki tujuan tertentu. Alasan utamanya dikatakan untuk membela dan mendukung rakyat Suriah atas tindakan otoriter yang dilakukan oleh penguasa. Hal ini dilakukan dengan mengatasmamakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena Amerika melihat bahwa pelanggaran HAM pada konflik ini sudah banyak terjadi. Amerika juga dalam hal ini berupaya untuk menyuarakan pentingnya demokratisasi di kawasan Suriah. AS bahkan menyatakan secara terus terang bahwa hasil yang diharapkan dari penyelesaian konflik Suriah adalah transisi demokrasi untuk Suriah. Oleh sebab itu, AS menganggap apabila terdapat hambatan pada proses itu maka dikategorikan sebagai ancaman bagi perdamaian di Suriah. Berdasarkan hal tersebut, Amerika dan sekutunya mendukung Dewan Koalisi Nasional Suriah selaku lembaga oposisi yang mengawasi proses Demokrasi di negara tersebut (Darwis, Konflik Suriah dalam Tinjauan Keamanan Internasional (Suatu Kajian “Wacana” Posmodernisme), 2013). Setidaknya Amerika Serikat membuat serangkaian tindakan untuk

kebijakan luar negerinya terhadap Suriah, diantaranya Amerika membentuk koalisi oposisi baru yang bertujuan untuk menciptakan konstitusi serta transisi politik baru dan melegalkannya sebagai pemerintahan yang sah secara sepihak bagi Suriah (Ayu, 2014).

Konflik ini telah memancing intervensi dari banyak pihak termasuk Rusia dan AS. Kedua negara ini cenderung melakukan intervensi militer di Suriah untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan yang sedang tidak stabil di wilayah ini. Presiden Bashar Al Assad ingin mempertahankan kekuasaannya dengan meminta bantuan kepada Rusia. Sedangkan kelompok oposisi menginginkan rezim Assad turun dan digantikan dengan sistem demokrasi yang didukung oleh AS. Adanya keterlibatan dari pihak eksternal semakin memperburuk situasi konflik karena memiliki kepentingan didalamnya. Masalah Suriah tidak lepas dari upaya kedua negara ini untuk menciptakan kawasan Timur Tengah untuk mendukung kepentingan politik dan ekonomi mereka khususnya minyak melalui kampanye *war on Terror* dan desain restrukturisasi politik regional bernama *Arab Spring* (Mau, 2016).

Sejauh ini Rusia dan Amerika Serikat belum ada realisasi konkrit mengenai penyelesaian konflik Suriah. Keduanya sama-sama saling menuduh tentang serangan yang lawan mereka lakukan di Suriah. Kedua negara super-power tersebut justru menjadikan konflik ini semakin parah dengan adanya serangan-serangan senjata dan bom yang mereka lakukan di Suriah. Oleh karena itu, beberapa negara di dunia berusaha untuk memikirkan penyelesaian konflik

ini dengan mengadakan pertemuan konferensi keamanan di Munchen Jerman pada Februari 2016. Konferensi ini dihadiri oleh 17 negara dan membahas mengenai rencana untuk mengembalikan proses perdamaian yang sempat terhenti. Negara-negara tersebut juga mendukung adanya penghentian kekerasan di seluruh Suriah dan pemeberian bantuan kemanusiaan ke Suriah (MI/As, 2016).

Pasca Perang Dingin kondisi dunia internasional sudah tidak lagi dapat dikendalikan. Sejumlah negara tidak dapat bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, disisi lain terdapat negara yang mengabaikan aturan dan hukum dunia internasional. Hal ini diungkapkan oleh Analis Rusia Timofei Bordachev yang memimpin Pusat Studi Eropa dan Internasional di sekolah tinggi ekonomi (HSE), menyebutkan bahwa kondisi seperti tadi akan membentuk tatanan dunia baru dimasa depan dan telah terlihat di konflik Suriah. Menurut Bordachev Situasi keamanan di Timur Tengah sekarang ini terlihat seperti kembali pada masa persaingan kekuatan besar. Sebagian negara dan organisasi internasional telah ikut terlibat dalam konflik ini. Negara-negara tersebut terbagi menjadi kamp-kamp atau kelompok yang mendukung pemerintah Suriah seperti Rusia, Tiongkok dan Iran melawan AS dan sekutunya yang membela kelompok oposisi. Kedua kelompok besar ini telah terlibat langsung dalam konflik di Suriah dan hal ini tidak dapat dihindari di Timur Tengah pasca perang dingin (Reski, 2016). Hal ini akan memicu terjadinya persangan-persaingan antara duakekuatan besartersebut di Timur Tengah terutama di Suriah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mencoba untuk meneliti permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana bentuk-bentuk persaingan di bidang militer antara Rusia dan Amerika Serikat dalam menangani konflik di Suriah?

## **C. Kerangka Berpikir**

### **1. Konsep Intervensi**

Intervensi merupakan keterlibatan suatu negara dimana berbagai pihak ketiga dapat terlibat dalam masalah dalam negeri negara lain yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan internal maupun eksternal negara lain. Intervensi dimaksudkan untuk membantu mengatasi suatu permasalahan atau konflik, baik konflik nasional maupun internasional. Dalam hal ini intervensi mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, politik maupun militer negara lain. Intervensi dapat dilakukan menurut hukum internasional apabila negara penerima mendapatkan hak berdasarkan perjanjian : 1.) Jika negara tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati secara unilateral. 2.) intervensi dapat dilakukan untuk melindungi warga negaranya. 3.) untuk memepertahankan diri. 4.) negara yang bersangkutan telah melanggar hukum.

Tindakan intervensi yang dilakukan suatu negara ke negara lain merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan dan meningkatkan nilai politik negara tersebut. Adapun bentuk intervensi yang biasanya dilakukan yaitu intervensi militer dan intervensi diplomatik. Intervensi militer merupakan



pengiriman pasukan militer untuk mempengaruhi atau membantu negara lain dalam menyelesaikan konflik melalui militer. Sedangkan intervensi diplomatik adalah penyelesaian masalah dengan cara perundingan dengan pihak lain. Terdapat dua aktor yang melakukan intervensi yaitu negara dan organisasi internasional (Noor, 2014).

Intervensi menurut K.J Holsti merupakan suatu tindakan eksternal yang mempengaruhi urusan negara lain. Tindakan radikal terhadap negara lain secara rahasia melalui tindakan berupa pengaruh diplomasi, pameran kekuatan, pemberontakan atau subversi, perang gerilya serta kekuatan militer. Mempengaruhi urusan internal negara lain adalah norma hukum internasional (Lumba, 2014). Menurut Holsti terdapat 5 bentuk intervensi yaitu :

1) Tindakan Politik Rahasia

Merupakan penyebaran propaganda tersembunyi melalui pemancar radio yang tidak di kenal, surat kabar di bawah tanah atau surat selebaran yang tidak di ketahui asalnya dapat di golongankan sebagai tindakan politik rahasia yang mencoba mempengaruhi proses politik dalam negeri negara lain demi kepentingan negaranya.

2) Unjuk Kekuatan

Salah satu teknik intervensi efektif dengan resiko dan biaya yang rendah adalah memperlihatkan atau mengancam untuk

menggunakan kekuatan, baik untuk membantu ataupun menghalangi pemberontakan dalam negeri negara lain.

### 3) Subversi

Istilah subversi menandai hampir semua pemberontakan dalam suatu negara, terdapat ciri subversi yaitu bahwa ia diatur, didukung atau di arahkan oleh kekuatan asing, dengan menggunakan berbagai unsur ketidak puasan dalam masyarakat untuk tujuannya sendiri.

### 4) Perang Gerilya

Strategi utama perang gerilya adalah memperoleh kekuasaan positif atas bagian yang terus menerus membesar dari penduduk yang secara bersamaan menjauhkan penduduk dari rezim yang berkuasa. Bertujuan untuk mengurangi secara perlahan-lahan kekuatan pemerintah sampai pada batas dimana mereka terpusat di kota-kota besar dan membiarkan para pemberontak mengkonsolidasi kekuatan mereka.

### 5) Intervensi Militer

Pengiriman sejumlah besar pasukan, baik untuk menjaga stabilitas suatu rezim terhadap pemberontak atau membantu pemberontak menggulingkan suatu rezim (Holsti, 1988).

Dari penjelasan bentuk-bentuk intervensi diatas, dapat dianalisis bahwa pada bentuk *tindakan politik rahasiaterlihat* ketika AS memerintahkan agen

rahasia CIA ke negara-negara dekat Suriah salah satunya di Turki untuk memantau pemasokan senjata kepada pemberontak. Dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat memerintahkan CIA untuk mendukung pemberontak Suriah dalam hal logistik. Dukungan terhadap tindakan rahasia ini juga berasal dari sekutu AS yakni Perancis dan Jerman. Kedua negara ini membantu AS dalam melakukan propaganda terhadap pejabat Suriah khususnya pengikut Assad agar beralih dari pemerintah dan meninggalkan Suriah. Kaburnya orang-orang kepercayaan Assad memiliki arti penting, karena mereka membawa informasi-informasi berharga mengenai kondisi politis dan militer pemerintah Suriah (Bosen, 2012).

*Unjuk kekuatan* antara Rusia dan AS di Suriah ini terlihat dari awal konflik, ketika Rusia mendukung pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Assad dan AS membela pemberontak-pemberontak di Suriah. Kedua negara ini terus menerus memperlihatkan kekuatan mereka di negara tersebut. Seperti Rusia menurunkan 28 pesawat tempur di Suriah, sedangkan Amerika Serikat mengirimkan 70 tentara pemberontak dibawah pasukan khusus AS (Sidik, 2015).

Pada tindakan *Subversi* ini AS selaku pihak luar mendukung kelompok pemberontak untuk menurunkan rezim Bashar Al Assad dan menghimbau para pemberontak untuk menyusun rencana pasca rezim. AS juga mengirimkan bantuan berupa senjata militer seperti mengirimkan 50 ton amunisi untuk pemberontak Suriah di wilayah Suriah utara. Bantuan ini merupakan alat untuk

pemberontak dapat menurunkan rezim Assad dan melawan kekuatan militer Rusia sebagai musuh mereka yang membela pemerintah suriah (Vinando, 2015)

Konflik Suriah ini bisa disebut juga sebagai *perang gerilyahal* ini dikarenakan sejarah awal timbulnya konflik ini adalah adanya pemberontakan untuk menurunkan rezim Bashar Al Assad. Para pemberontak berusaha untuk mempengaruhi masyarakat sipil untuk mendukung mereka dan menurunkan kekuasaan presiden sehingga terjadi revolusi.

Pada *intervensi militer* terlihat ketika intervensi yang dilakukan oleh Rusia dalam konflik internal Suriah adalah untuk mempertahankan identitas politiknya di negara tersebut, dimana Rusia telah menjalin kerjasama dalam berbagai bidang dengan pemerintahan Suriah yang berkuasa (noor, 2014). Pemerintah Rusia juga mengatakan bahwa intervensi militer di Suriah merupakan sebuah bentuk perlindungan diri atas ancaman dari gerakan islam di Suriah yang akan datang ke Rusia, bahkan melalui Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev menyatakan tidak masalah siapa yang menjadi pemimpin asalakan bukan dari ISIS (Burhani, 2015). Hal ini terlihat bahwa Rusia sangat melindungi keamanan militer Suriah, karena jika di sektor keamanan sudah terjamin maka kedaulatan negara dan kelangsungan hidup suatu negara akan aman.

Amerika Serikat dan Rusia masing-masing memiliki kekuatan dalam menangani konflik Suriah. Adanya dua kekuatan besar di Suriah justru terlihat persaingan kedua negara super-power tersebut. kedua negara ini tentu saja

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan konflik Suriah. AS dan Rusia merupakan aktor eksternal yang tidak dipungkiri sangat berpengaruh ke negara Suriah. keduanya sama-sama memiliki kepentingan di dalam konflik ini. Sehingga dibutuhkan sebuah resolusi konflik untuk menangani konflik ini.

## **2. Balance of power**

Konsep *balance of power* atau perimbangan kekuatan biasanya digunakan untuk untuk mengetahui suatu hubungan kekuasaan, seperti pada peristiwa negara Eropa mulai dari Perang Napoleon sampai Perang Dunia I. Perdebatan masih sering terjadi pada konsep-konsep yang terdapat pada studi hubungan internasional, hal ini dikarenakan gejala dan peristiwa yang ada dalam hubungan internasional bersifat fleksibel atau dapat berubah setiap saat. Tetapi, konsep *balance of power* adalah salah satu konsep yang sering menjadi diskusi. Akibatnya, muncul pemahaman-pemahaman yang berbeda oleh para pemikir mengenai konsep *Balance of power*. Dari konsep ini, akan diketahui bagaimana suatu negara berusaha untuk mempertahankan statusnya sebagai suatu entitas yang independen.

Realis tradisional melihat *balance of power* sebagai suatu cara, konsep, atau teori yang berpusat pada kekuatan atau *power*. Hans Morgenthau dalam bukunya *International Politics* mengungkapkan bahwa *balance of power* merupakan suatu realita, dimana kekuatan tersebut dikendalikan bersama secara adil dan sama rata oleh sekelompok negara. Negara-negara tersebut tentu saja memiliki pemikiran yang sama untuk menghancurkan atau mempertahankan

*status quo*. Menurut realis tradisional, tujuan utama dari sebuah kebijakan luar negeri adalah untuk mendapatkan kekuasaan atau *power*, begitu juga *Balance of power*. *Balance of power* menjadi satu-satunya alternatif untuk mencegah suatu negara *great power* untuk memiliki power yang melimpah, karena akan menyebabkan negara-negara lain yang kekuatannya lebih lemah merasa terancam. (Morgenthau, 1973).

*Balance of power* juga dipandang sebagai sebuah “hasil” di dalam level sistemik dan subsistemik dan juga sebagai suatu kondisi dalam keseimbangan kekuasaan atau *power equilibrium* antar negara-negara pemegang kekuasaan. Terdapat tiga konsep atau biasa disebut *balancing strategy* yakni: pertama *Hard Balancing* merupakan strategi dalam mengimbangi lawan, sebuah negara akan membangun dan selalu memperbarui kekuatan militernya, serta mempertahankan aliansi tandingannya untuk mengimbangi kekuatan. Kedua adalah *Soft Balancing*, keadaan ini terjadi ketika negara-negara mengembangkan perjanjian diantara mereka untuk menyeimbangi negara potensial. Kemudian hasilnya persaingan keamanan akan semakin kuat, dan mengakibatkan negara kuat tersebut merasa terancam. Ketiga *Asymmetric Balancing*, usaha negara bangsa dalam menyeimbangi negara yang lebih kuat dengan aktor subnasional yang bertindak untuk mengancam, seperti kelompok teroris (Yanuaryta, 2012).

Keterlibatan Rusia dan Amerika Serikat dalam konflik Suriah cenderung menggunakan *Hard Balancing*. Keduanya sama-sama menggunakan kekuatan militer untuk unjuk kekuatan. Rusia dan AS terus memperbarui bantuan militer

berupa persenjataan dan pelatihan militer kepada pihak-pihak yang mereka dukung agar dapat mempertahankan aliansi mereka di negara tersebut. Rusia menggunakan pesawat tempur, helikopter, dan drone di wilayah udara Suriah sebagai alat pertahanan untuk melindungi pemerintah Suriah. Sedangkan Amerika Serikat melalui NATO mengirimkan pesawat tempur guna mengimbangi kekuatan militer Rusia yang terus menyerang kelompok oposisi di wilayah Suriah. Amerika Serikat terus menerus memberikan pengaruhnya kepada kelompok oposisi untuk melancarkan tujuan mereka. Sebagai negara *super power* dunia, Amerika Serikat tentu saja menggunakan *Balance of power* untuk mengimbangi kekuatan militer Rusia karena AS memiliki kuantitas dan kualitas persenjataan yang tidak kalah dengan Rusia di wilayah Suriah. Perimbangan kekuatan digunakan pula sebagai alat untuk mempertahankan eksistensi kedua negara di wilayah Timur Tengah.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan yang ada serta di dukung oleh kerangka pemikiran, maka penulis dapat menarik hipotesis yaitu :

1. Rusia memberikan bantuan militer kepada Pemerintah Suriah sebagai bentuk dukungan untuk melawan pemberontak.
2. Mengetahui kekuatan Rusia di Suriah, AS juga berusaha memberikan bantuan kepada kelompok oposisi sebagai upaya untuk membuktikan kekuatan militer mereka mampu bersaing dengan Rusia.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan gambaran dinamika hubungan Amerika Serikat dan Rusia di dalam menangani konflik Suriah
2. Menjelaskan persaingan militer AS dan Rusia di dalam konflik Suriah

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap buku, literatur, makalah, jurnal ilmiah, majalah atau Koran, dan website dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara studi pustaka dan data sekunder dengan cara memperoleh data melalui dokumen, buku, diktat, makalah dan observasi melalui internet yang digunakan sebagai acuan dan kerangka pedoman teori untuk mengkaji masalah yang diteliti.

### **G. Jangkauan Penulisan**

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian agar lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.



Pada penelitian ini penulis telah membatasi kajian pada persoalan perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Rusia terhadap penanganan konflik Suriah sebelum ISIS muncul, yang sering bersebrangan karena kedua belah pihak membantu kelompok yang berbeda, Rusia lebih memilih untuk melindungi Rezim Bashar Al Assad sedangkan Amerika Serikat membantu kelompok oposisi yang pada akhirnya memunculkan pemikiran bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan dibalik keterlibatan mereka dalam konflik Suriah.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna untuk mempermudah penyusunan bahasa dan uraian-uraian. Sistematika penulisan yang akan dijabarkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, metode penulisan, tujuan penulisan, sistematika penulisan.

BAB II Membahas mengenai konflik Amerika Serikat dan Rusia, dalam hal ini penulis akan mengulas kembali bagaimana konflik Amerika Serikat dan Rusia yang terjadi pasca Perang Dunia II dan dampak dari Perang Dingin

BAB III Membahas mengenai konflik Suriah, dalam bab ini penulis mencoba memaparkan kronologi dan akibat yang ditimbulkan dari konflik Suriah yang terjadi sejak 2011 hingga sekarang.

BAB IV Membahas mengenai bentuk persaingan Rusia dan AS di Suriah, penulis akan menjelaskan bagaimana bentuk persaingan yang terjadi di konflik Suriah terutama dalam bidang militer.

BAB V Berisi Kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, serta kesimpulan tindakan kedua negara terhadap konflik Suriah.